Nama : Wahyuni

Kelas : HTN D

NIM : 10200120165

Dosen pembimbing: Kusnadir umar

Baik saya akan meresmikan materi yang di berikan kepada bapak dosen dari ke 6 materi yang sudah di jelaskan .

Materi pertama: istilah Hukum tatanegara

Hukum tatanegara adalah hukum yang mengatur berbagai aspek tentang manusia dengan manusia lainnya, yang mengatur semua yang di perlukan manusia baik itu hukum atasan maupun hukum bawahan. Yang mengatur hidup dan mati manusia, karena manusia sejak di lahirkan sudah berada pada yang namanya hukum hingga dia tumbuh dewasa.

Hukum tatanegara Indonesia berkisar atau membicarakan urusan urusan lembaga tinggi negara di konstitusi yang mengatur urusan urusan seperti eksekutif (presiden) penyelenggaraan undang undang negara.

Pengertian hukum tatanegara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana, siapa, seperti apa, dimana, hubungan hubungan antara lembaga lembaga tinggi negara (legislatif, yudikatif, eksekutif) dalam hubungan nya terselenggara kehidupan bernegara.

Hukum Tata Negara juga sebagai hukum mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dalam Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai istilah yaitu : 1. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara.

Berikut ini terdapat beberapa pengertian hukum tatanegara menurut para ahli :

1. Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

2. Menurut Kranenburg

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.

3. Menurut Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara Hukum tatanegara juga memiliki hubungan dengan hukum hukum lainnya seperti, ilmu negara, hukum administrasi negara, ilmu politik. Dengan hubungan dengan ilmu ini memiliki hubungan yang erat dari masing-masing hubungan.

Materi kedua : Sumber-sumber Hukum Tatanegara

Sumber hukum tatanegara dalam pengertian nya sebagai asalnya hukum isinya berupa keputusan yang hebat untuk memberikan keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang (mempunyai kewenangan) untuk itu.

Sumber hukum tatanegara juga sebagai tempat di temukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.sumber hukum dalam pengertian ini membawa pada penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan.

Sumber hukum tatanegara juga memiliki istilah yaitu :

a. Sumber hukum formal,yaitu sebagai peraturan-peraturan hukum positif,yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan.

b. Sumber hukum materi, sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dan menentukan hukum.

a. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang di lakuka. Secara berulang ulang oleh manusia mengenai sesuatu hal.

b. Kesepakatan

Suatu perjanjian yang mengandung materi yang di lakukan oleh masyarakat yang di sampaikan kepada DPR.

c. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang di lakukan oleh dua negara atau lebih.bila traktat juga di adakan dua negara saja namanya **bilateral**, dan jika di adakan oleh lebih dari dua negara dinamakan perjanjian **multilateral**. Kemudian jika perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara-negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakanuntuk juga menjadi pihak,dinamakan kolektif atau terbuka.

d. Yurisprudensi

Suatu putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri, kemudian di ikuti dan di jadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama.

e. Doktrin

Doktrin adalah pengambilan keputusan pengadilan dalam mempertimbangkan putusan.

Materi ketiga: asas-asas hukum tatanegara

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal berhubungan kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara tersebut.

Satu hal yang menjadi kendala dalam menyamakan pendapat adalah karena latar belakang para ahli yang berbeda-beda. Ahli yang berlatar belakang sosiologi hukum akan merumuskan pengertian asas hukum sesuai dengan kompetensinya, begitupun dengan pakar yang berlatar belakang sejarah, dll.

Hukum positif wajib merujuk pada asas-asas hukum yang berlaku, pembentukan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang bertentangan dengan asas harus dicabut, apalagi jika misalnya bertentangan dengan asas Pancasila atau asas negara hukum, dst.

Oleh karena sifat dari asas hukum itu tdk konkrit, maka asas hukum tidak secara langsung mengatur mengenai sanksi, tetapi pengaturan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak taat asas diatur dalam norma hukum.

Asas-asas hukum tatanegara:

- Asas Pancasila
- Asas kedaulatan rakyat
- Asas negara Hukum
- Asas pembagian kekuasaan
- Asas negara kesatuan

Faktor-faktor utama dalam ketatanegaraan

Ada tiga faktor utama dalam hal ketatanegaraan menurut Solly Lubis (1982: 15), yaitu:

- (a). Faktor filsafat negara.
- (b). Faktor konstitusi dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan
- (c). Faktor garis politik, yang satu sama lain sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan baik dalam teori maupun praktek.

Fungsi asas hukum tatanegara :Fungsi Asas Hukum Sebagai Penjaga Konsistensi,yaitu menjaga proses pembentukan hukum.Fungsi Asas Hukum Untuk Mengatasi Konflik, mengatasi konflik ketika terjadi pertentangan antar peraturan hukum ataupun antar organ/lembaga negara.

Materi ke empat:Asas-asas Hukum Tata Negara

Secara bahasa,asas berarti asas mengandung tiga arti yaitu:

- Dasar/alas/pedoman
- Kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berfikir.
- Cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan.

Pengertian asas menurut para ahli:

1. Pengertian asas hukum menurut bellefroid

Merupakan (suatu) norma dasar yang di jabarkan dari hukum positif yang (dimana)ilmu hukum tidak di anggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

2. Pengertian asas hukum menurut p.shoiten

Kecenderungan-kecenderungan yang di syatkan (oleh) pandangan kesusilaan kita pada hukum (yang) merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum akan tetapi tidak boleh tidak harus ada (harus ada)

Macam-macam asas hukum di Indonesia:

1. Asas hukum umum

Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum.misalnya:

- Asas lex posteriori derogat Legi priori(peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama).
- Asas Lex speciali derogat Legi Generali(peraturan yang lebih khusus akan mengesampaikan peraturan yang bersifat lebih umum).
- Asas Lex superior derogat Legi inferior(peraturan yang lebih tinggi akan mengesampaikan peraturan yang lebih rendah).

2. Asas hukum khusus

Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.misalnya:

- a. Dalam pendataan hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda(setiap janji itu mengikat),asas konsensualisme.
- b. Dalam hukum pidana berlaku presumption of innocence (asas praduga tak bersalah),asas legalitas.

Materi kelima: sejarah ketatanegaraan Indonesia

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah terjadi sejak masa pra Proklamasi kemerdekaan yang dimana ada beberapa perubahan sistem ketatanegaraan. Pada masa penjajahan sistem ketatanegaraan Indonesia masih diperlakukan oleh kekuasaan para penjajah.Pada masa pasca Proklamasi Indonesia sudah mulai membenah dalam sistem ketatanegaraan yang buktinya telah terjadi beberapa sitem ketatanegaraan yang telah ditetapkan seperti pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Negara Sementara Tahun 1950, Sistem ketatanegaraan Orde Baru, dan yang terbaru setelah Reformasi menuju Konsolidasi sistem Demokrasi.

A..Masa penjajahan Belanda

Indonesia pada masa ini kekuasaan tertinggi ada di tangan Raja Hindia Belanda. Dan dibantu oleh Gubernur Jendral sebagai pelaksana. Raja Belanda bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda adalah sistem Parlementer Kabinet.

B. Indische Staatsregeling (IS)

IS merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan disebut Algemene Verordeningen (Peraturan Umum), yang dikenal dimasa berlakunya IS, adalah:

1. Wet: dibentuk oleh badan pembentuk Undang-Undang Negeri Belanda, yaitu mahkota dan Parlemen.
2. Algemene Maatsregelen van Bestuur (AmvB), dibentuk oleh mahkota sendiri.
3. Ordonnantie, dibentuk oleh Gubernur Jendral bersama-sama dengan Volksraad.

C. Masa Pendudukan Bala Tentara Jepang.

Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah :

- a. Sebagai penguasa pendudukan. Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang.
- b. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia timur raya termasuk Indonesia dengan menyebut dirinya sebagai Saudara tua.

Dalam sistem ketatanegaraan seharusnya pemerintahan Indonesia lebih memiliki sifat transparan, dimana setiap permasalahan yang ada selalu bisa diikuti perkembangannya oleh masyarakat. Dan masyarakat lebih tau tentang kinerja birokrasi ketatanegaraan Indonesia.

Materi ke enam: KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. objek berupa benda atau barang atau hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUHP bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- Benda bergerak
- Benda tidak bergerak

Istilah konstitusi telah dikenal sejak jaman Yunani Purba, hanya konstitusi itu masih diartikan materiil karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politea dan nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Diantara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa politea mengancam kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politea mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada

nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Menurut sejarah Yunani istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan *Respublica constituere*. Dari sebutan ini lahirlah semboyan yang berbunyi “*Prinsep Legibus Solutus est, Salus Publica Suprema Lex*”, yang artinya Rajalah yang berhak menentukan organisasi/struktur dari pada Negara, oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang.

- Konstitusi dalam arti luas mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian Negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, dan peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi.

- Sebaliknya konstitusi dalam arti sempit, menurut sejarahnya dimaksudkan untuk memberi nama kepada dokumen pokok yang berisi aturan mengenai susunan organisasi Negara beserta cara kerjanya organisasi itu. Pengertian ini yang dimaksud konstitusi sama dengan undang-undang.

- Konstitusi rijid, apabila perubahan konstitusi dengan cara yang khusus.

- fleksibel, apabila dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, artinya perubahan itu dilakukan dengan cara yang tidak sulit.

dalam bukunya Teori Konstitusi, mengungkapkan paling tidak ada enam sifat konstitusi, yaitu :Konstitusi luwes, Konstitusi tegas, Konstitusi realistik, Konstitusi idealistik, Konstitusi konservatif; dan Konstitusi progresif.

Materi ke enam: Organ Fungsi Kekuasaan Negara

A. Pembatasan Kekuasaan

1. Fungsi-fungsi kekuasaan. Menurut John Locke fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi:

- 1) Fungsi Legislatif

- 2) Fungsi eksekutif

- 3) Fungsi Federatif. Dalam studi ilmu administrasi publik dikenal pula adanya teori yang membagi kekuasaan kedalam dua fungsi saja, kedua fungsi itu adalah:

1. Fungsi pembuatan kebijakan.
  2. Fungsi pelaksanaan kebijakan

Dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam konteks yang berbeda yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam konteks vertikal, pemisahan kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan pemerintah atasan dengan pemerintahan bawahan.

-Cabang kekuasaan legislatif

- Fungsi pengaturan (legislatif)

Cabang kekuasaan legislatif adalah suatu cabang kekuasaan yang pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu; prakarsa pembuatan, pembahasan rancangan UU, persetujuan atas pengesahan rancangan UU, pemberian persetujuan pengikatan atas perjanjian dan dokumen hukum yang mengikat lainnya.

•fungsi pengawasan

Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam 3 hal yaitu:

1. Kontrol atas pemeriksaan
2. Kontrol atas pengeluaran
3. Kontrol atas pemungutan pajak

- Fungsi perwakilan

Perlemen difungsikan sebagai forum perdebatan mengenai berbagai aspirasi dalam rangka rule making. ada 3 sistem perwakilan, diantaranya, sistem perwakilan politik, sistem perwakilan te, sistem perwakilan fungsional.